

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PERSEPSI MAHASISWA KOTA SEMARANG  
TERHADAP DEMOKRATISASI INDONESIA



Oleh:  
Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.  
NIDN: 0025036509

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA FISIP UNDIP  
Tahun Anggaran 2014

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Semarang  
2014

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Persepsi Mahasiswa Kota Semarang Terhadap Demokratisasi Indonesia
2. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Jurusan / Prodi : Ilmu Pemerintahan
4. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.
  - b. NIP/NIDN : 19650325 198803 1 001/0025036509
  - c. Jabatan Fungsional dan Golongan : Lektor Kepala/IVA
  - d. Fakultas/Jurusan : ISIP/Ilmu Pemerintahan
  - e. Alamat dan No. Telp. Kantor : Jl. Prof. H. Soedharto, S.H. Tembalang Semarang 50275 Tel. 7465407
  - f. Alamat dan No. Telp. Rumah : Jl. Jangli Krajan Barat IV/132 Semarang 50254 Tel. 8446808
5. Lokasi Penelitian : Kota Semarang
7. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
8. Biaya Yang Diperlukan : Rp 5.900.000,00 (*lima juta Sembilan ratus ribu rupiah*)
9. Sumber Dana : DIPA FISIP UNDIP Tahun Anggaran 2014

Semarang, 17 November 2014

Mengetahui  
Dekan FISIP



Drs. Agus Hermanto DS, MM  
NIP. 19570803 198511 1 001

Ketua Peneliti,

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.  
NIP. 19650325 198803 1 001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc.  
NIP. 19651029 199003 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa untuk selesainya penelitian dan penulisan laporan penelitian ini. Penelitian ini didasari keinginan untuk mengetahui dan memahami persepsi mahasiswa Kota Semarang terhadap demokratisasi di Indonesia.

Setelah lebih dari satu setengah dasawarsa reformasi politik terjadi dan berlangsung, telah tercapai banyak perubahan mendasar dan kemajuan pesat dalam tata nilai dan tata kelola pemerintahan di Indonesia; termasuk perubahan kelembagaan utama dan terbentuknya kelembagaan tambahan (*auxiliary state organs*). Namun dalam kenyataan, pada level masyarakat belum terbentuk secara penuh kultur politik demokrasi yang menopang beroperasinya berbagai kelembagaan tersebut sehingga terkesan ada kesenjangan antara kelembagaan demokrasi dan kultur warga negaranya.

Penelitian terhadap mahasiswa sebagai bagian warga negara yang terdidik dan memiliki peran unik dalam sejarah perkembangan bangsa dipandang sangat penting dan mendesak. Kiranya hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi perkembangan demokratisasi di Indonesia.

Peneliti,

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.

## ABSTRACT

In materializing the whole system of democratic government, Indonesia has undertaken the process of democratization (the transition, consolidation, and maturing of citizen's political culture). Students were perceived as one of strategic elites along the democratization processes in this country. As political reformation movement goes by, however, the role of students in democratization is questioned very often. This research deals with the Semarang Municipal students' perception toward democratization in Indonesia.

Therefore the aim of this study was to describe the perceptions of Semarang Municipal students toward democratization in Indonesia. The analysis showed that the democratic system is in conformity with the system of government in Indonesia. The students as a part of citizens confided that the ongoing democratization in Indonesia has done well but not convinced that democratization in Indonesia (with the implementation of the transition and consolidation) have been able to improve the socio-economic conditions of society and makes government of Indonesia to be better.

Recommendations from this study as follows: (i) Government should provides early political education on the all subjects of democratic political system, providing open space for society, more transparent and accountable in the implementation of governance (ii) Citizens should accepts democracy as "the only game in town" and more caring and actively participate in the political system (iii) Students should improves and maintains the fighting spirit in defending the fate of nations, revive its role as an agent of change.

*Keywords:* Democratization, perception, democratic political system.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.    Rumusan Masalah .....	7
1.3.    Tujuan Penelitian .....	7
1.4.    Kontribusi Penelitian .....	8
1.5.    Luaran Penelitian .....	8
1.6.    Tinjauan Pustaka .....	8
1.7.    Operasionalisasi Konsep .....	25
1.8.    Metode Penelitian .....	26
<b>BAB II    DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN</b>	
2.1.    Visi Misi Kota Semarang .....	29
2.2.    Keadaan Demografi .....	33
2.3.    Keadaan Sosial Ekonomi .....	35
<b>BAB III    MAHASISWA DAN DEMOKRATISASI</b>	
3.1.    Identitas Responden .....	37
3.2.    Persepsi Mahasiswa Terhadap Demokratisasi di Indonesia ....	39
3.2.1. Orientasi Kognitif Mahasiswa .....	39

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.  
NIP/NIDN : 19650325 198803 1 001/0025036509  
Pangkat/Gol : Pembina/IVa  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jurusan/Fakultas : ISIP/Illmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penelitian yang kami susun dengan judul:

**“Persepsi Mahasiswa Kota Semarang Terhadap Demokratisasi Indonesia”**

Adalah benar-benar hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat dari penelitian atau karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 17 November 2014

Pembuat Pernyataan,

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK MEMBANGUN BANGSA  
TOL



9149BAA5434803521

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.

NIP.19650325 198803 1 001

3.2.2. Orientasi Afektif Mahasiswa .....	50
3.2.3. Orientasi Evaluatif Mahasiswa .....	60
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kota Semarang .....	33
Tabel 2.2. Perkembangan Penduduk .....	34
Tabel 3.1. Deskripsi Responden Menurut PTN.....	37
Tabel 3.2. Deskripsi Responden Menurut Angkatan.....	38
Tabel 3.3. Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	38
Tabel 3.4. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Sistem Demokrasi.....	39
Tabel 3.5. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Akuntabilitas Sistem Demokrasi .....	40
Tabel 3.6. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Suksesi Kekuasaan dalam Demokrasi.....	41
Tabel 3.7. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Rekrutmen Politik yang Terbuka dalam Sistem Demokrasi.....	43
Tabel 3.8. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Pemilu.....	44
Tabel 3.9. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang HAM.....	45
Tabel 3.10. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Masa Transisi Demokrasi di Indonesia.....	46
Tabel 3.11. Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia .....	47
Tabel 3.12. Deskripsi Responden tentang konsolidasi Demokrasi.....	48
Tabel 3.13. Deskripsi Responden tentang Budaya Politik.....	49
Tabel 3.14. Sumber Pengetahuan Responden tentang Demokratisasi.....	49
Tabel 3.15. Deskripsi Responden tentang keyakinan terhadap Kesesuaian Sistem Demokrasi dan Pelaksanaan Pemerintahan.....	51
Tabel 3.16. Deskripsi Responden Menurut Keyakinan bahwa Pemerintah Indonesia Sudah Akuntabel.....	52
Tabel 3.17. Deskripsi Responden Menurut Keyakinan Terhadap Suksesi Kekuasaan di Indonesia.....	53

Tabel 3.18. Deskripsi Responden menurut Keyakinan terhadap Keterbukaan Rekrutmen Politik.....	34
Tabel 3.19. Deskripsi Responden Menurut Keyakinan Terhadap Kejujuran dan Keadilan Pelaksanaan Pemilu.....	35
Tabel 3.20. Deskripsi Responden Menurut Perasaan terhadap Adanya Perlindungan HAM dan Kebebasan Pers di Indonesia.....	36
Tabel 3.21. Deskripsi Responden Menurut Keyakinan terhadap Demokratisasi Dalam Tatakelola Pemerintahan.....	37
Tabel 3.22. Deskripsi Responden tentang Kaitan Budaya Politik dan Sistem Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia.....	38
Tabel 3.23. Deskripsi Responden Menurut Keyakinan tentang Kesesuaian Harapan Terhadap Demokratisasi di Indonesia .....	39
Tabel 3.24. Deskripsi Responden Menurut Evaluasi terhadap Demokratisasi di Indonesia.....	60

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1998 Indonesia masuk babak baru demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; baik tata kelembagaan, tata kelola pemerintahan dan hubungan kekuasaan pusat-daerah, maupun hubungan negara dan masyarakat. Sebagai suatu sistem, demokrasi memiliki unsur-unsur yang mendukung eksistensi dan perkembangannya, seperti negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik (partai politik dan kelompok kepentingan), serta pers yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>1</sup> Sedangkan prinsip pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), supremasi hukum atau pemerintahan berdasarkan hukum (*law supremacy* atau *rule of law*), serta kesederajatan (*equality*) dan kebebasan (*liberty*).<sup>2</sup> Prinsip tersebut dilakukan agar tidak terjadinya tindak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh setiap institusi maupun individu, selain itu juga agar dapat memberikan kebebasan dan keadilan secara merata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Demokratisasi di Indonesia ditandai oleh proses transisi dari rezim orde baru menuju orde reformasi. Pergantian masa tersebut diakibatkan oleh penolakan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto yang otoriter dan terjadinya stagnasi atau kegagalan ekonomi yang memperburuk keadaan perekonomian rakyat

---

<sup>1</sup> *Demokrasi Indonesia*. Dalam [www.courseware.politeknitelkom.ac.id](http://www.courseware.politeknitelkom.ac.id) diunduh pada tanggal 4 Mei 2014 pada pukul 16.25 WIB

<sup>2</sup> Muhadam Labolo, dkk. (2008). *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm. 530.

sehingga mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Demokratisasi di Indonesia dalam perkembangannya didukung oleh upaya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 3 tahun (1999-2002), sehingga menjadi dasar bagi penataan kelembagaan demokrasi (*democratic-institutional arrangement*) pada cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta pelaksanaan pemilihan umum yang telah berlangsung sebanyak 4 kali (1999, 2004, 2009, 2014).

Setelah masa reformasi 1998, Indonesia telah melaksanakan demokrasi terbuka, otonomi daerah, dan kebebasan pers<sup>3</sup>, namun ternyata masih belum dapat memperbaiki kondisi masyarakat secara keseluruhan yang dikarenakan belum tercapainya tujuan demokrasi. Otonomi daerah yang dianggap dapat membantu pemerintah pusat untuk dapat mengatur rumah tangga di setiap daerah, ternyata memberikan permasalahan baru dimana terbentuknya penguasa-penguasa baru di daerah yang mengakibatkan ketidakstabilan antara demokrasi dan politik nasional. Belum tercapainya tujuan demokrasi sebenarnya dikarenakan masih adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Walaupun pemerintah telah melakukan konsolidasi terhadap lembaga-lembaga, struktur maupun sistem politik di Indonesia, namun pemerintah masih belum dapat melakukan konsolidasi terhadap kultur atau budaya politik di Indonesia. Budaya politik itu sendiri menurut Almond & Verba adalah sikap-sikap individu terhadap peran mereka sendiri di dalam sistem politik, sehingga bagaimana pemerintah mensosialisasikan sistem

---

<sup>3</sup> Azyumardi Azra, dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) diunduh tanggal 16 Mei 2014 pada pukul 17.35 WIB

yang demokratis terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengerti akan peran mereka terhadap sistem politik dan ikut berpartisipasi secara aktif di dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Pemerintahan yang demokrasi membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya *performed* (eksis dan tegak). Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Karena itu harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya (Saiful Mujani, 2002). Untuk itu masyarakat harus menjadikan demokrasi sebagai *way of life* yang menuntun tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintahan, dan kenegaraan<sup>4</sup>. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek yang berperan pasif dan tidak memiliki peran penting, namun bisa menjadi aktor politik yang dapat berperan aktif di dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Demokrasi tidak lagi hanya sekedar sebagai alat untuk dapat melaksanakan sistem pemerintahan namun sekaligus juga menjadi suatu tujuan untuk dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan konsolidasi terhadap budaya politik di Indonesia diakibatkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat diakibatkan oleh kurang efektifnya kinerja pemerintah

---

<sup>4</sup>Demokrasi Indonesia. *op.cit.*

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menentukan dan melaksanakan keputusan kebijakan publik, pemberian pelayanan publik, serta dalam upaya penegakan hukum. Selain akibat dari ketidak efektifan kinerja pemerintah, penurunan kepercayaan masyarakat juga diakibatkan oleh semakin meningkatnya kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.

Kinerja pemerintah yang belum efektif serta meningkatnya kasus KKN akan mengakibatkan kesulitan bagi bangsa Indonesia dalam mengharapkan terjadinya pembangunan bangsa yang efektif dan bahkan sulit juga mengharapkan terwujudnya cita-cita bangsa untuk dapat mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat bekerja keras untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang telah lama memudar. Apabila pemerintah tidak dapat menanggulangi permasalahan tersebut maka pemerintah juga tidak dapat meningkatkan budaya politik di Indonesia yang akan mengakibatkan tidak dapat berjalannya pemerintahan yang demokrasi. Karena pemerintahan yang demokrasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (yang merupakan aktor politik) terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan.

Upaya membangun budaya politik yang demokrasi memang jauh lebih sulit dibandingkan dengan membangun struktur demokrasi. Hal ini menyangkut kebiasaan masyarakat yang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk merubahnya. Bayangkan, Indonesia yang secara struktur telah merepresentasikan sebagai negara demokrasi, namun masih banyak peristiwa-peristiwa yang

yang tidak akuntabel dan transparan sehingga dianggap tidak mampu memecahkan masalah sosial dan ekonomi yang terjadi.

Demokrasi yang dianggap sebuah sistem pemerintahan yang paling baik untuk Indonesia, karena memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat, ternyata tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap demokratisasi di Indonesia yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dianggap perlu untuk dikaji, karena masyarakat merupakan aktor utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga perlu diketahuinya persepsi dari masyarakat itu sendiri.

Persepsi itu sendiri adalah hasil interaksi yang berupa pemahaman, pengertian dan pengenalan tentang objek tertentu terhadap apa yang diamati, diketahui, dialami maupun yang dirasakan. Baik Davidoff maupun Bimo Walgito menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses *intergrated* yaitu keseluruhan hal yang ada dalam individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lainnya.<sup>7</sup> Sehingga persepsi masyarakat terhadap demokratisasi yang berlangsung di Indonesia adalah pemahaman masyarakat yang disertai dengan ikatan emosional mereka terhadap proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian mereka terhadap pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Apabila masyarakat merupakan suatu komunitas terbesar di dalam suatu negara, maka salah satu bagian dari komunitas tersebut adalah mahasiswa.

---

<sup>7</sup> Siswati. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Pemilu 1999*. Dalam [www.journal.unair.ac.id/pdf](http://www.journal.unair.ac.id/pdf) diunduh pada tanggal 4 Mei 2014 pada pukul 16.25 WIB.

menggambarkan kebebasan yang semakin liar; kekerasan, bentrokan fisik, konflik antar etnis/ras dan agama, ancaman bom, teror, rasa tidak aman, dan sebagainya<sup>5</sup>.

Bahkan mengatasnamakan demokrasi, sebagian orang menyalurkan aspirasinya dengan melakukan demonstrasi atau demo. Demo telah menjadi senjata ampuh, terinspirasi dari kekuatan demo yang dapat melengserkan kekuasaan Orde Baru. Sejak era reformasi kegiatan demonstrasi mudah didapat di banyak tempat, paling tidak dari tayangan televisi hampir tiap hari tersaji. Karena seringnya kegiatan demo yang kadang sekedar atau asal demo agar memperoleh pemberitaan di media, maka timbul istilah *plesetan* kata demokrasi menjadi “demo-crazy”. Demokrasi sangat dekat dengan kebebasan yang amat luar biasa, sebagian ada yang dilakukan dengan cara demo yang mendekati cara-cara yang “crazy”. Peristiwa terbunuhnya ketua DPRD Sumatra Barat oleh para demonstran menjadi salah satu tragedi dari kebebasan berdemokrasi, yang dilaksanakan bukan saja secara “crazy”, melainkan sudah masuk kategori biadab<sup>6</sup>.

Hingga saat ini, yaitu 16 tahun setelah masa reformasi, demokrasi ternyata masih belum dapat terwujud dengan seutuhnya. Seperti yang telah dipaparkan di atas, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan konsolidasi terhadap sistem, lembaga-lembaga dan budaya, sehingga hal yang terlebih dahulu dapat dilakukan oleh pemerintah adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat. Karena penyebab utama menurunnya partisipasi masyarakat adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sutejo. *Demokrasi: antara harapan dan Kenyataan*. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2014 pada pukul 16.25 WIB.

Mahasiswa yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia memiliki peranan penting dalam mengaspresiasi suara rakyat kepada pemerintah. Mahasiswa yang bisa dikategorikan sebagai cendekiawan, harus mampu memahami suatu obyek secara obyektif, kritis, tidak terikat oleh golongan atau kelompok tertentu, harus dapat membedakan yang baik dan buruk, benar atau salah sesuai dengan ilmunya. Selain itu cendekiawan mempunyai tanggung jawab moral terhadap lingkungannya.<sup>8</sup> Sehingga mahasiswa Indonesia harus dapat memahami lebih kritis terhadap proses demokrasi atau demokratisasi di Indonesia dengan tidak memiliki keterikatan terhadap ideologi suatu golongan maupun kelompok tertentu, karena mahasiswa merupakan bagian kaum yang intelektual.

## 1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian utama tentang bagaimana persepsi mahasiswa Kota Semarang terhadap demokratisasi Indonesia akan dijawab melalui sejumlah subpertanyaan, seperti: bagaimana tingkat pengetahuan (*cognitive*), tingkat keterlibatan emosional (*affective*), dan tingkat kemampuan menilai (*evaluative*) di kalangan mahasiswa Kota Semarang terhadap demokratisasi Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang persepsi mahasiswa Kota Semarang terhadap berbagai aspek demokratisasi Indonesia.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

#### 1.4. Kontribusi Penelitian

Secara akademis, hasil penelitian berguna bagi pengayaan (*enrichment*) kajian demokratisasi, terutama persepsi kalangan muda terdidik terhadap efektivitas demokrasi di negara berkembang.

Secara praktis, hasil penelitian berguna bagi para pembuat keputusan (*decision-makers*) untuk merumuskan berbagai kebijakan yang mampu mengarahkan warga negara kepada penguatan nilai dan kultur yang prodemokrasi.

#### 1.5. Luaran Penelitian

Penelitian akan menghasilkan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah nasional.

#### 1.6. Tinjauan Pustaka

##### **Persepsi**

Persepsi adalah inti dari komunikasi. Sedangkan penafsiran (*interpretasi*) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Hal ini jelas tampak menurut Cohen dalam Mulyana (2001) bahwa persepsi didefinisikan sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal serta pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana. Ahli komunikasi lain (de Vito, 1997) mendefinisikan persepsi sebagai proses dengan mana seseorang menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indranya. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau

proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya.<sup>13</sup>

Menurut Hawkins, dkk, proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>14</sup>:

a. Penampakan (*exposure*)

Penampakan terjadi jika stimulus mengenai saraf reseptor dari panca indera. Tidak semua stimulus dapat ditangkap. Hanya beberapa stimulus yang sebelumnya sudah diseleksi dan ditangkap oleh individu.

b. Perhatian (*attention*)

Perhatian terjadi jika stimulus mengenai saraf reseptor dari panca indera dan hasil sensasi ini dibawa ke otak untuk diproses. Perhatian dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja.

c. Interpretasi (*interpretation*)

Interpretasi adalah pemberian makna terhadap stimulus yang diperhatikan oleh individu. Interpretasi afektif adalah respon emosional yang dimunculkan oleh stimulus sedangkan kognitif adalah proses menempatkan stimulus dalam kategori makna yang telah ada sebelumnya berdasarkan pengalaman dan situasi.

Menurut Siagian (1995) ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu<sup>15</sup> :

---

<sup>13</sup> Rina Martini dan Yuwanto. (2010). Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Remunerasi. *Laporan Penelitian*. Universitas Diponegoro. Hlm. 5.

<sup>14</sup> Ervina Sugiharto. (2012). Persepsi Masyarakat Terhadap Penderita Skizofrenia. *Skripsi*. UNIKA. Hlm. 8-9.

<sup>15</sup> Persepsi.pdf. Dalam <http://repository.usu.ac.id>. Diunduh pada tanggal 2 Mei 2013 pada pukul 17.30 WIB.

- a. Diri orang yang bersangkutan, dalam hal ini orang yang berpengaruh adalah karakteristik individual meliputi dimana sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan.
- b. Sasaran persepsi, yang menjadi sasaran persepsi dapat berupa orang, benda, peristiwa yang sifat sasaran dari persepsi dapat mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya. Hal-hal lain yang ikut mempengaruhi persepsi seseorang adalah gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan lain-lain dari sasaran persepsi.
- c. Faktor situasi, dalam hal ini tinjauan terhadap persepsi harus secara kontekstual artinya perlu dalam situasi yang mana persepsi itu timbul.

Menurut Walgito terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu<sup>16</sup>:

- a. Objek yang dipersepsi  
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.
- b. Alat indera, syaraf, dan susunan syaraf  
Alat indera (reseptor) merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu harus ada syaraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan respon, maka motoris sebagai pembentuk persepsi.
- c. Perhatian

---

<sup>16</sup>Ervina Sugiharto. *op.cit.*

pesan apa yang diserap dan apa makna yang diberikan kepada seseorang ketika orang tersebut mencapai kesadaran<sup>9</sup>.

Persepsi oleh Desiderato diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan<sup>10</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna persepsi itu sendiri adalah tanggapan langsung dari sesuatu, serapan, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya<sup>11</sup>. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, persepsi sebagai proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga dapat mengenal suatu obyek dengan jalan asosiasi pada suatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera peradaban, dan sebagainya sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari.<sup>12</sup>

Persepsi seseorang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya pengalaman, proses belajar, wawasan serta pengetahuan individu. Faktor pengalaman dan proses belajar akan memberi bentuk terhadap apa yang dilihat, didengar dan dirasakan, sementara wawasan dan pengetahuan individu akan memberikan arti terhadap obyek psikologis. Menurut Young (1956) persepsi merupakan aktifitas mengindra, mengintegrasikan, dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Mar'at (1981) mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu

---

<sup>9</sup>Alwin Taher, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Kesadaran Gender*, dalam <http://repository.ipb.ac.id>. Diunduh pada tanggal 2 Mei 2014 pada pukul 17.25 WIB.

<sup>10</sup>Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 51.

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. 1995. hlm. 807.

<sup>12</sup>Ensiklopedia Indonesia Vol VI. Jakarta. 1990. hlm. 759

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan obyek.

### **Demokrasi**

Menurut makna katanya demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.<sup>17</sup> Ketika Abraham Lincoln menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal di Gettysburg di tahun 1863, secara sederhana ia menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Akan tetapi, kalau diteliti lebih mendalam, inti dari demokrasi itu adalah pemerintahan “oleh rakyat”. Alasannya karena semua pemerintahan, apapun bentuknya, pasti berasal dari rakyat (tak seorangpun di antara mereka yang memerintah yang bukan berasal dari rakyat) dan karena sebuah pemerintahan yang otoriter bisa juga berbuat baik untuk kepentingan rakyat (biasanya disebut *benevolent authoritarian rezime*). Jadi, hanya pemerintahan oleh rakyatlah yang murni mencerminkan demokrasi.<sup>18</sup>

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, yang biasanya

---

<sup>17</sup>Diponolo. (1975). *Ilmu Negara Jilid 2*. PN Balai Pustaka. hlm. 111.

<sup>18</sup> Muhadam Labolo, *op.cit.*, hlm. 529.

diungkapkan dengan “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga sangat perlu melihat bagaimana demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis<sup>19</sup>. Dengan menggunakan kedua pemahaman tersebut, maka demokrasi tidak hanya digunakan sebagai substansi dari sebuah sistem pemerintahan saja, namun dapat menjadikan sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan negara, dan masyarakat itulah yang dapat menilai apakah negaranya sudah melaksanakan demokrasi atau belum.

Demokrasi terjadi akibat dari adanya penolakan maupun pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter untuk dapat menggantikannya dengan pemerintahan yang lebih mementingkan nasib rakyatnya yaitu demokrasi. Penolakan dilakukan karena masyarakat menganggap bahwa sistem demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat mementingkan masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan ruang yang lebih terbuka untuk dapat mengekspresikan keinginan mereka dan diharapkan dapat menciptakan kehidupan politik yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selain akibat dari rezim yang otoriter, demokrasi juga dapat disebabkan oleh stagnasi ekonomi atau kegagalan ekonomi yang mengakibatkan memburuknya keadaan perekonomian suatu negara dan meningkatnya tingkat kemiskinan. Sehingga dengan demikian, sistem pemerintahan yang demokratis merupakan

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 4.

sebuah jawaban untuk dapat memperbaiki kondisi sebuah negara yang sedang mengalami permasalahan tersebut.

Sedangkan prinsip dari pemerintahan yang demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), supremasi hukum atau pemerintahan berdasarkan hukum (*law supremacy* atau *rule of law*), serta kesederajatan (*equality*) dan kebebasan (*liberty*). Maksud dari pemisahan itu adalah untuk menghindari menumpuknya suatu kekuasaan pada satu tangan, entah itu dalam artian institusi atau pribadi. Sejalan dengan pemisahan kekuasaan, demokrasi juga menjadikan hukum sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku, maka negara demokrasi biasanya diidentikkan dengan negara hukum. Adapun kesederajatan dan kebebasan secara teoritis diartikan sebagai kesamaan hak dari setiap pribadi untuk menikmati kehidupan dan mengejar kebahagiaan.<sup>20</sup>

Dengan demikian setiap negara yang menggunakan sistem demokrasi, akan memberikan kekuasaan maupun kedaulatannya kepada rakyat, dan setiap individu di dalamnya akan diberikan hak kebebasan beserta dengan perlindungan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatannya di dalam bidang politik, hukum, agama, sosial dan ekonomi. Pada sistem demokrasi, masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, seperti misalnya ikut serta di dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak suaranya secara bebas tanpa ada campur tangan partai lain untuk mempengaruhi hak suaranya; ikut andil dalam menentukan sebuah kebijakan (masyarakat tidak hanya

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 530.

sebagai objek kebijakan tetapi juga sebagai pengontrol maupun pengawas terhadap pelaksanaan suatu kebijakan).

Apabila pemilihan para pengambil keputusan tingkat tinggi oleh rakyat merupakan esensi demokrasi, maka titik kritis dalam proses demokratisasi adalah digantikannya pemerintah yang dipilih dalam suatu pemilihan yang bebas, terbuka dan adil. Akan tetapi, keseluruhan proses demokratisasi sebelum dan sesudah pemilihan itu biasanya kompleks dan berlangsung lama. Proses itu mencakup pengakhiran rezim nondemokratis, pengukuhan demokratis, dan kemudian konsolidasian sistem yang demokratis<sup>21</sup>. Ketika mencapai tingkat sosial dan ekonomi tertentu, negeri-negeri memasuki zona transisi di mana kemungkinan mereka untuk bergerak menuju demokrasi meningkat dengan nyata. Pengaruh dari luar negeri boleh jadi menimbulkan upaya demokratisasi sebelum negeri-negeri itu mencapai zona itu, atau menghambat atau mencegah terjadinya demokratisasi oleh negeri-negeri yang telah mencapai tingkat perkembangan itu.<sup>22</sup>

Huntington dan J. Linz mengkategorikan transisi dalam tiga bentuk: Pertama adalah transformasi. Transformasi menurut Huntington (Linz menyebutnya dengan *reforma*), terjadi ketika elite politik mengambil alih kekuasaan ke demokrasi. Kedua, adalah replasementasi (*replacement*-Huntington, *ruptura*-Linz) terjadi ketika pihak oposisi mengambil alih kekuasaan ke demokrasi, dan rezim otoritarian mengalami pengkolapsan atau penghancuran (penggulingan). Ketiga, yakni transplasementasi (*transplacement*-Huntington, *ruptforma*-Linz) terjadi ketika demokratisasi disebabkan oleh perluasan aksi

---

<sup>21</sup> Huntington, Samuel; penerjemah, Asril Marjohan. (1997). *Gelombang Demokratisasi ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 8.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 104.

bersama (negosiasi, kompromi, dan dialog komunikatif) antara kelompok oposisi dengan pemerintah.<sup>23</sup>

Menurut Huntington, ada beberapa elemen utama yang dapat menopang demokrasi yang telah terbukti mendorong terjadinya transisi ke demokrasi di beberapa negara; 1) pembangunan ekonomi 2) tidak adanya feodalisme dalam masyarakat 3) borjuasi yang kuat 4) kelas menengah yang kuat 5) tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi 6) instrumental budaya 7) pluralisme sosial dan kelompok menengah yang kuat 8) elite politik yang mendukung demokrasi 9) pengalaman sebagai koloni Inggris 10) *civil society* berupa tradisi toleransi dan kompromi, tradisi menghormati hukum dan hak-hak individu, homogenitas dan heterogenitas komunal, suku, agama, ras 11) intervensi kekuatan asing yang pro demokrasi, dan 12) konsensus mengenai nilai-nilai politik dan sosial.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, Huntington mengatakan untuk menjamin agar transisi ke demokrasi dapat terkonsolidasi dengan baik, maka: 1) transisi itu perlu memapankan sistem konstitusi dan merekonstruksi sistem Pemilu yang baru 2) melakukan penyingkiran terhadap para aparatus status quo yang pro terhadap otoritarianisme 3) mencabut atau melakukan amandemen perubahan terhadap Undang-Undang yang tidak cocok untuk demokrasi 4) menghapus atau secara drastis mengubah badan-badan yang otoriter, seperti polisi rahasia atau pada sistem satu partai memisahkan hak milik, fungsi dan personalia pemerintah 5) memetakan secara jelas antara kekuatan pendukung demokrasi dengan kekuatan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 34.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 64.

penopang status quo yang masih menyimpan loyalitas secara sembunyi terhadap kebesaran rezim otoriter, sehingga rezim demokratik mampu mengambil langkah yang tegas terhadap berbagai komponen penghalang demokrasi.<sup>25</sup>

Sehingga dengan demikian, setiap negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang telah mengalami masa transisi, dimana adanya pergantian rezim yang otoriter ke rezim yang demokratis. Pada masa transisi tersebut pemerintah dituntut dapat melakukan berbagai konsolidasi terhadap sistem politik, budaya politik, maupun lembaga-lembaga. Sehingga dengan adanya konsolidasi tersebut, dapat memperbaiki kondisi suatu negara dengan menjadikan demokrasi bukan hanya sekedar alat sistem politik tetapi juga menjadikan sebuah tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Secara empirik paling tidak ada beberapa indikator demokrasi dalam praktek bernegara menurut Robert Dahl, yaitu: akuntabilitas, dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang ditempuhnya. Rotasi kekuasaan, dalam demokrasi sudah semestinya ada rotasi kekuasaan mutlak. Tanpanya, kekuasaan menjadi otoriter. Rekrutmen politik yang terbuka, untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan. Pemilihan umum, dalam demokrasi, tidak ada negara tanpa pemilu. Menikmati hak-hak dasar atau seseorang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hak untuk berbicara, berkumpul, hak hidup dan kebebasan pers.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 76.

Betapapun tidak sempurnanya hasil yang dapat dicapai dari upaya demokratisasi, ia pasti akan mampu menampilkan pemerintahan yang lebih baik daripada otoritarianisme. Alasannya? Karena demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, memiliki mekanisme untuk mencegah kesewenang-wenangan, menghargai supremasi hukum, serta mengakui kesederajatan dan kebebasan. Persoalannya adalah demokrasi tidak akan terbentuk dengan sendirinya hanya karena ia baik. Ia bukan sesuatu yang dapat terwujud secara alamiah. Demokrasi memerlukan upaya yang konsisten dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa ia merupakan idealisme yang layak diperjuangkan.<sup>26</sup>

### **Budaya Politik**

Teori tentang budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami sistem politik. Budaya politik, kata Almond dan Verba merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat *cognitive*, *affective* dan *evaluative*.<sup>27</sup>

Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan

---

<sup>26</sup> Mahadam labolo, dkk, *op.cit.*

<sup>27</sup> Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 99.

positif tersebut dilakukan oleh pejabat atau rakyat biasa akan menghadapi penerapan hukuman yang sama.<sup>33</sup>

Jika diamati secara cermat kekurangmampuan sistem politik Indonesia memberi solusi yang efektif, misalnya atas masalah korupsi, kolusi antara pejabat negara dan pelaku ekonomi swasta, rekrutmen politik yang bukan saja belum mencerminkan kehendak rakyat tetapi juga kurang mampu menampilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas tinggi, tingkah laku pejabat pemerintahan yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat kecil, birokrasi yang tidak efisien, pendekatan keamanan yang cenderung efisien eksekutif, praktik dagang hukum di pengadilan, serta tingkah laku massa yang bersifat anarkis dan destruktif. Pada akhirnya, sebab utama dari semua itu akan ditemukan pada kenyataan bahwa sistem politik yang selama ini dipelihara belum cukup demokratis. Oleh karena itu, salah satu tantangan fundamental yang perlu dijawab dalam menyongsong abad mendatang adalah bagaimana agar proses demokratisasi kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan Indonesia dapat dipacu. Indonesia memerlukan pemerintahan yang lebih demokratis, pemerintahan yang *representative* dan lebih bertanggung jawab kepada rakyat, paling tidak ada dua keburukan yang sulit dikendalikan, yakni praktik kekuasaan yang sewenang-wenang dan sikap massa yang anarkis.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, proses demokratisasi yang tumbuh dari bawah akan sangat menentukan masa depan dari demokrasi itu sendiri. Alasannya, jika mayoritas warga negara bertingkah laku demokratis secara konsisten akan sulit

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 535.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 535-536.

*intellectual enterprise* dan gerakan arus bawah dengan mudah bisa berubah menjadi anarkis. Oleh karena itu, dalam proses yang tiada henti menuju demokrasi, komitmen masyarakat luas untuk berdemokrasilah yang pada tingkat pertama justru perlu dibangun. Hal itu hanya mungkin diharapkan manfaatnya jika mengambil bentuk sebagai perjanjian pribadi dan perjanjian sosial yang sifatnya seumur hidup dan terus diperbaharui dari generasi ke generasi. Gerakan demokratisasi yang bersifat musiman, apalagi yang sekedar ditujukan untuk mengakhiri suatu rezim otoriter yang tidak memiliki agenda jangka panjang yang jelas dan disepakati, bukanlah sesuatu yang menjanjikan masa depan yang cerah.<sup>32</sup>

Gairah yang tinggi untuk menjadikan demokratisasi sebagai jalan keluar dari berbagai kemelut politik, ekonomi, dan sosial yang kita hadapi saat ini bisa dipahami. Akan tetapi, demokratisasi bukanlah obat mujarab yang secara serta merta bisa melepaskan bangsa kita dari kemelut-kemelut tersebut. Sistem politik yang demokratis hanya akan membuka peluang bagi berlangsungnya dialog yang luas tentang cara bagaimana mengatasi setiap masalah. Namun, sudah sendirinya hal ini menguntungkan karena secara minimal proses demokratisasi akan mendorong pelembagaan sistem kekuasaan sehingga akan lebih menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam proses itu, praktek kesewenangan kekuasaan dapat dihambat dan lahirnya pemerintahan oleh rakyat akan dapat diwujudkan. Demokratisasi akan memperbaharui kepercayaan rakyat bahwa konstitusi dan hukum positif dapat menjadi landasan bertindak pejabat negara dan warga negara. Tidak menjadi masalah, apakah pelanggaran konstitusi dan hukum

---

<sup>32</sup> Mahadam Labolo, dkk, *op.cit.*, hlm. 534-535.

mempunyai keyakinan bahwa mereka memiliki kompetensi untuk terlibat dalam proses politik yang berjalan. Konsekuensi selanjutnya adalah kalangan pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang memperhatikan kepentingan warga masyarakat. Kalau tidak demikian, warga masyarakat akan mengalami *deprivasi*, sehingga mereka menjadi kecewa dan meninggalkan pemerintah. Pada pemilihan yang akan datang, mereka tidak akan memilih pemimpin yang meninggalkan mereka. Sebaliknya, kalau warga masyarakat tidak merasa kompeten untuk terlibat dalam proses politik, implikasinya adalah peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara menjadi sangat dominan. Rakyat menjadi sasaran dan objek kebijaksanaan pemerintah yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah. Di sinilah salah satu sumber utama bagi terbentuknya sebuah budaya politik yang demokratik, yaitu *civic culture*.<sup>30</sup>

Almond dan Verba mengkaitkan antara tinggi-rendah budaya politik atau *civic culture* dengan kehadiran demokrasi dalam sebuah negara. Negara-negara yang mempunyai *civic culture* yang tinggi akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki derajat *civic culture* yang rendah tidak mendukung terwujudnya sebuah demokrasi yang stabil.<sup>31</sup>

### **Strategi Demokratisasi**

Dari berbagai pengalaman, kebangkitan gerakan intelektual dan gerakan arus bawah menuntut demokratisasi sebagai modal awal yang penting dalam mengakhiri kekuasaan otoriter. Akan tetapi, demokratisasi bukanlah sekedar

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 101.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 101-102.

lain sebagainya. Sementara itu, orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Jadi menyangkut *feelings* terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya.<sup>28</sup>

Dengan sikap dan orientasi seperti itu, kemudian terbentuklah budaya politik yang berbeda. Dalam sebuah masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya didominasi oleh karakteristik yang bersifat kognitif akan terbentuk budaya politik yang *parokial*. Sementara, dalam sebuah masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya diwarnai oleh karakteristik yang bersifat afektif, akan terbentuk budaya politik yang bersifat *subjective*, akhirnya, masyarakat yang memiliki kompetensi politik yang tinggi, di mana warga masyarakat mampu memberikan evaluasi terhadap proses politik yang bersifat *partisipatif*.<sup>29</sup>

Budaya politik yang demokratis, dalam hal ini budaya politik yang partisipatif, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Budaya politik yang demokratis ini menyangkut "suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi," kata Almond dan Verba (1987:178). Keyakinan akan kemampuan seseorang merupakan kunci bagi sebuah sikap politik, dan keyakinan akan kemampuan tersebut merupakan kunci bagi terbentuk dan terpeliharanya demokrasi. Jadi, kompetensi merupakan kata kunci. Artinya, warga negara

---

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 100.

### 1.7. Operasionalisasi Konsep

- a. Persepsi adalah pandangan terhadap objek tertentu dalam lingkungan berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang dimiliki seseorang; dihasilkan dari pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang dirasakan oleh masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Demokratisasi adalah proses dan tahapan menuju tatanan kelembagaan dan perilaku demokratis seluruh unsur negara-bangsa.

Dari berbagai konsep di atas, secara operasional ditentukan berbagai indikator persepsi mahasiswa sebagai berikut:

- a. Kognitif: Pengetahuan mahasiswa terhadap proses demokratisasi, pemahaman mahasiswa terhadap kelembagaan politik, sistem pemerintahan dan tatakelola pemerintahan, serta pengetahuan mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan dan diri sendiri (*self*) sebagai bagian dari komunitas politik.
- b. Afektif: Perasaan keterlibatan (emosional) mahasiswa terhadap berbagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki.
- c. Evaluatif: Penilaian mahasiswa terhadap proses demokratisasi, pemahaman mahasiswa terhadap kelembagaan politik, sistem pemerintahan dan tatakelola pemerintahan, serta pengetahuan mahasiswa terhadap kinerja pemerintahan dan diri sendiri (*self*) sebagai bagian dari komunitas politik.

## 1.8. Metode Penelitian

### **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah kuantitatif-deskriptif; sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian survai. Penelitian survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>39</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat, yang menjadi objek penelitian ini, berdasarkan apa yang terjadi.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program sarjana (S1) yang masih aktif dalam pelaksanaan perkuliahan di PTN di Kota Semarang.

Terdapat 2 metode pengambilan sampel, yaitu sampel probabilitas (*probability sampling*) dan non probabilitas (*nonprobability sampling*). Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode probabilitas (*probability sampling*) yaitu individu/unit yang diambil dari populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi sampel.<sup>40</sup> Adapun teknik yang digunakan adalah sampel acak stratifikasi (*stratified random sampling*) dimana data dikelompokkan

---

<sup>39</sup> Singarimbun dan Sofian Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, hlm. 33.

<sup>40</sup> Erwan Agus dan Dyah Ratih, *op.ci,t*. Hlm. 40.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan bagi penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik:

1. Kuesioner, yakni daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk pertanyaan terbuka dan tertutup.
2. Wawancara, yakni teknik pengumpulan data dengan suatu daftar atau lembar pertanyaan yang belum dicantumkan pilihan jawabannya.
3. Dokumentasi, yakni dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dan gambaran umum penelitian.

## **Instrumen Penelitian**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kombinasi kuesioner tertutup dan wawancara. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk mengukur persepsi mahasiswa. Sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi mahasiswa secara lebih mendalam.

## **Teknik Analisis**

Teknik analisis mengacu pada penggunaan skala Likert, melalui tahapan membuat tabel kontingensi, untuk mengetahui besarnya jumlah frekuensi jawaban dari mahasiswa yang hanya meminta satu jawaban. Kemudian analisis data dilakukan dengan bantuan program komputer yaitu Program *Statistical Packages for Social Science (SPSS) for Windows Release 13.0*.

bagi kekuatan-kekuatan antidemokrasi untuk mengembangkan pengaruhnya. Kesimpulannya adalah penghayatan atas ketidakberdayaan yang terlalu dalam akan sama berbahayanya dengan sikap mabuk kekuasaan. Ketidakberdayaan ataupun kelebihan kekuasaan, keduanya mengandung potensi untuk menyeleweng.<sup>35</sup>

### **Persepsi Mahasiswa Terhadap Demokratisasi**

Mahasiswa adalah termasuk cendekiawan, sebagai cendekiawan mahasiswa harus mampu memahami suatu obyek secara obyektif, kritis, tidak terikat oleh golongan atau kelompok tertentu, harus dapat membedakan yang baik dan buruk, benar atau salah sesuai dengan ilmunya. Selain itu cendekiawan mempunyai tanggung jawab moral terhadap lingkungannya.<sup>36</sup>

Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tertentu, antara lain<sup>37</sup>:

1. Mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelegensia.
2. Yang karena kesempatan di atas diharapkan nantinya dapat bertindak sebagai pemimpin yang mampu dan terampil, baik sebagai pemimpin masyarakat ataupun dalam dunia kerja.
3. Diharapkan dapat menjadi “daya penggerak yang dinamis bagi proses modernisasi”.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 536.

<sup>36</sup> Siswati, *op.cit.*

<sup>37</sup> Taher, Alwin, *op.cit.*

4. Diharapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang berkualitas dan profesional.

Seperti apa yang telah dipaparkan mengenai budaya politik, maka untuk dapat mengukur bagaimana sikap mahasiswa terhadap sistem politik adalah dengan menggunakan tiga komponen budaya politik menurut Almond dan Verba, yaitu *cognitive* (kognitif), *affective* (afektif) dan *evaluative* (evaluatif). Komponen kognitif untuk menilai tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai jalannya sistem demokrasi di Indonesia. Komponen afektif untuk mengetahui perasaan mahasiswa terhadap aspek-aspek sistem politik yang membuat mahasiswa menerima atau menolak sistem demokrasi di Indonesia. Sedangkan komponen evaluatif orientasi politik ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dipunyai seseorang. Di sini, norma-norma yang dianut akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik.<sup>38</sup>

Sehingga dengan demikian, mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki intelektualitas, diharapkan dapat menginterpretasikan proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa telah mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai proses demokratisasi melalui pendidikan maupun pengalaman dari orang lain. Melalui pengetahuan yang telah mereka dapatkan, maka mahasiswa memiliki perasaan khusus terhadap sistem sistem politik yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem demokrasi, sehingga mahasiswa dapat memberikan penilaian terhadap proses demokratisasi yang telah berlangsung di Indonesia.

---

<sup>38</sup> Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hlm. 21-22.

ke dalam strata-strata yang didasarkan atas perbedaan sifat/karakter sesuai tujuan penelitian.<sup>41</sup>

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan disajikan dalam bentuk numerik maupun dalam bentuk deskriptif berupa teks, kata-kata tertulis, frasa atau simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang, tindakan, dan peristiwa dalam kehidupan mahasiswa Kota Semarang. Sedangkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti yang berhubungan atau berkaitan dengan persepsi mahasiswa Kota Semarang terhadap demokratisasi di Indonesia meliputi:

- a) Data hasil survei mahasiswa Kota Semarang yang diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner.
- b) Data hasil wawancara untuk mendeskripsikan lebih dalam bagaimana persepsi mahasiswa Kota Semarang terhadap demokratisasi di Indonesia.

#### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari studi pustaka maupun data yang relevan dengan penelitian yang diangkat.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm. 44.

## BAB II

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### 2.1. Visi Misi Kota Semarang

Visi Kota Semarang selama kurun waktu 2010-2015 adalah “Terwujudnya Semarang Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera.” Sedangkan misi untuk pencapaian visi tersebut adalah: (1) Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat kota semarang yang berkualitas (2) Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum (3) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah (4) Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, dan (5) Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dengan posisinya yang strategis pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, serta merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai utara, koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Kota Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan, dan barat menuju Kabupaten Kendal menjadikan Kota Semarang sebagai kota yang layak dan menarik untuk berinvestasi. Kondisi yang demikian terlihat dari munculnya berbagai kawasan industri di Kota Semarang, sebut saja : Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma (KITW), Kawasan Industri Terboyo, LIK

Bugangan Baru, Taman Industri BSB, Tanjung Emas Export Processing Zone, dan sederet nama lain, yang hampir semuanya sudah terisi.

Potensi lain dari Kota Semarang yang tak kalah pentingnya adalah tersedianya sarana prasarana fisik meliputi : jalan, jembatan, pelabuhan laut, terminal peti kemas, bandar udara internasional, hotel, perbankan, terminal, disamping tentunya sarana penunjang lain yang sifatnya non fisik seperti: kondisi kota yang aman, jumlah penduduknya yang besar, regulasi/kebijakan yang mengatur pelayanan publik dan kepastian hukum. Tetapi, dibalik keberhasilan yang telah diraih, pembangunan bagi Kota Semarang masih harus ditingkatkan untuk masa yang akan datang yang sekaligus juga menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sepanjang tahun 2010-2015.

Kota Semarang mempunyai luas wilayah sebesar 373,70 Km<sup>2</sup> yang merupakan 1,15% total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kota Semarang dibagi menjadi 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Terdapat 2 kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 Km<sup>2</sup> yang sebagian besar wilayahnya berupa persawahan dan perkebunan. Kedua kecamatan ini terletak di bagian selatan yang mana dikenal dengan sebutan Kota Atas karena sebagian besar merupakan wilayah perbukitan yang masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sementara itu, 2 kecamatan terkecil ada pada Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Semarang Tengah seluas

6,14 Km<sup>2</sup>. Sebagai besar wilayahnya merupakan pusat perekonomian dan bisnis Kota Semarang.

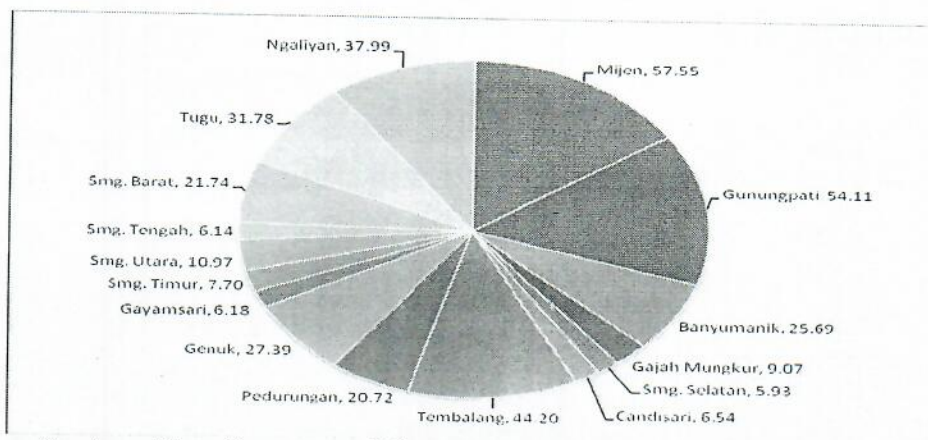
Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Kota Semarang mempunyai batas wilayah administratif antara lain, yaitu sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara berbatasan oleh Laut Jawa dengan garis pantai yang panjangnya mencapai 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang sendiri terletak antara 0,75 hingga 348,00 di atas garis pantai.

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari tiga bagian yaitu, daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai yang mengakibatkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah perbukitan sebesar 37,78% dengan kemiringan 15-40%, sedangkan daerah pantai dengan 65,22% wilayahnya merupakan dataran yang mempunyai kemiringan sebesar 25%. Hal ini dikarenakan wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Oleh karena itu dapat dikatakan Kota Semarang mempunyai ciri khas dengan adanya tiga daerah tersebut dan hal itu sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya. Kota bawah yang hampir keseluruhan tanahnya terdiri dari pasir dan lempung banyak dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, permukiman/perumahan, bangunan kawasan industri maupun tambak. Disamping itu, Semarang bagian bawah masih menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan, transportasi dan

perikanan. Lain halnya dengan Kota Atas yang sebagian besar adalah daerah perbukitan, meliputi Jatingaleh, Gombel, Tugu, Mijen, Gunungpati dan Semarang Selatan.

Kota Semarang sebagai kota provinsi dapat dikatakan belum terlalu padat penduduk. Pada tahun 2013 kepadatan penduduk sebesar 4.133 jiwa/km.<sup>2</sup> Persebaran penduduk pada masing-masing kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari kecamatan yang ada di Semarang, wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Tugu sebesar 938 jiwa/km.<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Mijen 954 jiwa/km.<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunungpati 1.358 jiwa/km.<sup>2</sup> Karena sebagian besar wilayah tersebut masih merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, beberapa wilayah yang terletak di pusat kota dengan luas wilayah tidak terlalu besar justru mempunyai jumlah penduduk yang banyak. Kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini terbagi di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Semarang Selatan 14.024 jiwa/km.<sup>2</sup>, Kecamatan Candisari 12.225 jiwa/km.<sup>2</sup>, Kecamatan Gayamsari 11.826 jiwa/km.<sup>2</sup>, kemudian Semarang Tengah 11.812 jiwa/km.<sup>2</sup> dan Kecamatan Semarang Utara 11.615 jiwa/km.<sup>2</sup>. Berikut merupakan gambar pembagian wilayah administrasi Kota Semarang.

Gambar 2.1  
Wilayah Administrasi Kota Semarang (Km<sup>2</sup>)



Sumber: Kota Semarang dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2013

## 2.2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk Kota Semarang periode tahun 2008-2013 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2008 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki, dan 758.409 penduduk perempuan. Peningkatan jumlah penduduk juga terjadi pada tahun 2013 menjadi sebesar 1.527.433 jiwa.

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Kota Semarang  
Tahun 2005-2009

No.	Tahun	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan (%)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	2008	705,627	713,851	1,419,478	1,45%
2.	2009	711,755	722,270	1,434,024	1,06%
3.	2010	722,026	732,568	1,454,594	1,43%
4.	2011	735,457	746,183	1,481,640	1,86%
5.	2012	748,515	758,409	1,506,924	1,71%
6.	2013	758,267	769,166	1,527,433	1,36%

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2013

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian dan migrasi. Pada tahun 2005 jumlah kelahiran sebanyak 19.504 jiwa, jumlah kematian sebanyak 8.172 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 38.910 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 29.107 jiwa. Besarnya penduduk yang datang ke Kota Semarang disebabkan daya tarik Kota Semarang sebagai kota perdagangan, jasa, industri dan pendidikan.

Tabel 2.2  
Perkembangan Penduduk Lahir, Mati dan Pindah Kota Semarang  
Tahun 2008-2012

No.	Tahun	Penduduk Jiwa			
		Lahir	Mati	Datang	Pindah
1.	2008	19,504	8,172	38,910	29,107
2.	2009	21,445	9,023	42,714	32,557
3.	2010	22,838	10,018	43,151	35,180
4.	2011	24,472	10,018	44,187	37,128
5.	2012	25,262	10,373	38,518	34,172

Sumber: *Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2013*

Dari tabel dapat diketahui bahwa penduduk yang datang ke Kota Semarang dan penduduk yang lahir setiap tahunnya lebih besar dari pada penduduk yang pindah dan penduduk yang mati, hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan penduduk Kota Semarang disebabkan oleh penduduk yang datang dan lahir dengan proporsi rata-rata 60,04% per tahun dibanding penduduk pindah dan penduduk yang mati.

### 2.3. Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena terkadang tidak semua masyarakat dapat menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Seringkali pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari masyarakat. Produktivitas dari sektor lapangan usaha PDRB Kota Semarang juga dapat menjadi tolok ukur kemampuan ekonomi yang ada di Semarang. Produktivitas ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sebesar 14,69% per tahun.

Kondisi perekonomian Kota Semarang membaik seiring dengan konstannya pertumbuhan PDRB dalam kurun waktu 2012-2013 yang mengalami pertumbuhan. Untuk PDRB konstan tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp 22.640.410 (juta) dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 21.365.818 (juta), sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang naik dari 5,87% dari tahun 2012 menjadi 5,97% di tahun 2013.

Jika dilihat dari jumlah PDRB Perkapita pada tahun 2012-2013 Kota Semarang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari Rp 27.891.155 di tahun 2012 menjadi Rp 30.868.237 atau naik sekitar 10,67% di tahun 2013. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor yang berperan paling tinggi menyumbang PDRB di Kota Semarang dengan persentase menyentuh 27,92% di tahun 2012 dan 27,70% di tahun 2013. Sub sektor yang paling berperan adalah sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang mencapai lebih dari 80% dari keseluruhan sektor.

Kota Semarang dari segi pendidikan pada tahun 2013 lebih membaik dibandingkan dengan tahun 2012. Angka Melek Huruf pada tahun 2013 naik menjadi 99,76% dibanding tahun 2012. Angka rata-rata lama sekolah untuk pendidikan wajib belajar 9 tahun cenderung tetap. Sedangkan rata-rata Angka Partisipasi Kasar Sekolah di Kota Semarang naik sekitar 14% yaitu menjadi 108,97% lebih tinggi dibanding rata-rata Angka Partisipasi Murni yang juga mengalami kenaikan sekitar 4% dibanding tahun lalu yaitu menjadi sebesar 78,32%. Untuk angka pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama pada jenjang SMA/SMK yaitu menjadi 99,85% atau mengalami kenaikan lebih dari 43% dibandingkan tahun sebesar 56,52%.

## BAB III

### MAHASISWA DAN DEMOKRATISASI

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan interpretasi terhadap data persepsi mahasiswa Kota Semarang mengenai demokratisasi di Indonesia. Persepsi adalah penafsiran atau pandangan terhadap objek tertentu dalam lingkungan berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Persepsi merupakan hasil dari pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang dirasakan oleh tiap-tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Demokratisasi adalah suatu proses maupun tahapan menuju tatanan dan praktik kehidupan demokrasi, yaitu sebuah sistem yang memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat di dalam pelaksanaan kegiatan ketatanegaraan. Dengan demikian yang dimaksud dengan persepsi mahasiswa Kota Semarang terhadap demokratisasi di Indonesia adalah pandangan dan penilaian mereka terhadap pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia.

#### 3.1. Identitas Responden

Tabel 3.1  
Deskripsi Responden Menurut PTN

No.	Jurusan	Jumlah	%
1.	Undip	45	45,0
2.	Unnes	35	35,0
3.	IAIN Walisongo	20	20,0
	Jumlah	100	100

Sumber: Data primer yang telah diolah 2014.

Tabel 3.1 di atas memperlihatkan responden yang berasal dari Universitas Diponegoro merupakan bagian terbesar, yaitu 45%, diikuti responden yang berasal dari Universitas Negeri Semarang sebanyak 35%, dan IAIN Walisongo sejumlah 20%.

Tabel 3.2  
Deskripsi Responden Menurut Angkatan

No.	Angkatan	Frekuensi	%
1.	Tahun 2010	8	8,0
2.	Tahun 2011	10	10,0
3.	Tahun 2012	20	20,0
4.	Tahun 2013	30	30,0
5.	Tahun 2014	32	32,0
	Jumlah	100	100

Sumber: Data primer yang telah diolah 2014.

Tabel 3.2 memperlihatkan mahasiswa terbanyak dari angkatan tahun 2013 dan tahun 2014, yaitu sebanyak 30% dan 32%, dan yang terkecil adalah mahasiswa angkatan tahun 2010. Hal itu logis karena mahasiswa angkatan tahun 2013 dan 2014 umumnya masih aktif kuliah; sedangkan mahasiswa angkatan 2010 terkecil jumlahnya karena umumnya mereka sudah memasuki masa akhir studi.

Tabel 3.3  
Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	45	45,0
2.	Perempuan	55	55,0
	Jumlah	100	100

Sumber: Data primer yang telah diolah 2014.

### 3.2. Persepsi Mahasiswa Terhadap Demokratisasi di Indonesia

Persepsi mahasiswa terhadap demokratisasi di Indonesia diukur melalui 3 orientasi individual, yaitu: kognitif, afektif dan evaluatif (Almond dan Verba, 1987). Orientasi kognitif digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman; orientasi afektif untuk mengetahui keterlibatan emosional; dan orientasi evaluatif untuk mengetahui penilaian mahasiswa terhadap demokratisasi di Indonesia.

#### 3.2.1. Orientasi Kognitif Mahasiswa

Tabel 3.4  
Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Sistem Demokrasi

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Tidak mengetahui	5	5,00
2.	Kurang mengetahui	47	47,00
3.	Mengetahui	41	41,00
4.	Sangat mengetahui	7	7,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 1 yang telah diolah.

Tabel 3.4. memperlihatkan sebagian besar responden mengaku kurang mengetahui tentang sistem pemerintahan demokrasi, yaitu sebanyak 47%. Bahkan terdapat sebanyak 5% responden lainnya yang mengaku tidak mengetahuinya. Di sisi lain, sebanyak 41% responden mengaku mengetahuinya dan sisanya sebanyak 7% lainnya mengaku sangat mengetahuinya. Responden yang mengaku mengetahui tersebut beralasan karena sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem yang paling banyak digunakan oleh negara-negara modern di dunia.

Pelaksanaan demokrasi pada sebuah negara, menurut sebagian kecil responden yang mengetahui sistem demokrasi dinilai sebagai sebuah keniscayaan, di mana keberadaan demokrasi, seiring dengan bergulirnya isu globalisasi dan HAM, dianggap sebagai sesuatu yang keharusan dalam rangka mampu mewedahi aspirasi dan keinginan masyarakat yang sangat heterogen.

Tabel 3.5  
Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang  
Akuntabilitas Sistem Demokrasi

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Tidak mengetahui	6	6,00
2.	Kurang mengetahui	24	24,00
3.	Mengetahui	55	55,00
4.	Sangat mengetahui	15	15,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 2 yang telah diolah.

Tabel 3.5 memperlihatkan sebagian besar responden mengetahui tentang akuntabilitas demokrasi, yaitu sebanyak 55%. Bahkan terdapat sejumlah 15% responden lainnya yang mengaku sangat mengetahuinya. Dalam pemahaman mayoritas responden ini, sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya kewajiban bagi pemerintah untuk dapat memertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya, terlepas kebijakan tersebut *favourable* maupun *unfavourable*. Kebijakan publik yang diambil pemerintah yang berkuasa, senantiasa memiliki berbagai dimensi, baik secara administratif maupun yang berimplikasi ke ranah pidana, bilamana kebijakan publik yang diambil merupakan sebuah pelanggaran atau penyelewengan atas kewenangan yang diberikan kepada pejabat yang bersangkutan, karena bertentangan dengan sistem perundang-

undangan yang berlaku. Dimensi kebijakan publik yang lain yang dikenal oleh sebagian besar responden adalah dimensi etis, di mana sebuah kebijakan publik memiliki sisi moral dalam implementasi di lapangan, karena menyangkut aspek kepatutan dan kepatutan.

Tabel 3.5 tersebut juga memperlihatkan sebanyak 24% responden mengaku kurang mengetahui tentang akuntabilitas demokrasi, dan bahkan sejumlah 6% responden lainnya mengaku tidak mengetahuinya. Sebagian kecil responden ini beralasan bahwa akuntabilitas demokrasi tidak ubahnya semacam adanya keharusan bagi pemerintah untuk selalu menjaga iklim keterbukaan atas kebijakan publik yang diambilnya, tanpa adanya suatu tendensi muatan tertentu yang tidak disosialisasikan sebelumnya kepada masyarakat.

Tabel 3.6  
Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang  
Suksesi Kekuasaan dalam Demokrasi

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Tidak mengetahui	5	5,00
2.	Kurang mengetahui	42	42,00
3.	Mengetahui	46	46,00
4.	Sangat mengetahui	7	7,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 3 yang telah diolah

Tabel 3.6. di atas memperlihatkan sebagian besar responden mengaku mengetahui adanya suksesi kekuasaan dalam sistem demokrasi sebagai sesuatu proses pergantian kepemimpinan agar terhindar dari sistem pemerintahan yang otoriter, yaitu sebanyak 46%. Bahkan terdapat sejumlah 7% responden lainnya

mengaku sangat mengetahuinya. Umumnya mayoritas responden ini beralasan bahwa dalam sistem demokrasi terdapat pemilihan umum, di mana dalam proses pemilihan umum tersebut berlangsung kompetisi secara terbuka bagi warga negara yang berkeinginan menjadi pemimpin negara. Adanya kompetisi yang pada intinya semacam suksesi ini, tidak ubahnya adalah suatu proses di mana untuk menjaga agar sistem pemerintahan yang ada, tidak berlangsung secara otoriter. Adanya periodisasi tertentu dalam bentuk pemilihan umum, sangat memungkinkan setiap warga negara yang memiliki hak dipilih melakukan kompetisi dalam pemilihan umum yang berlangsung.

Tabel 3.6. tersebut juga memperlihatkan sebanyak 42% responden mengaku kurang mengetahui tentang suksesi kekuasaan dalam sistem demokrasi sebagai mekanisme untuk menjaga agar sistem pemerintahan tidak otoriter. Bahkan sejumlah 5% responden lainnya mengaku tidak mengetahui tentang hal tersebut. Pada sebagian kecil responden ini, umumnya mereka memiliki anggapan bahwa sistem demokrasi pun pada realitasnya tidak dapat menjamin sistem pemerintahan berlangsung secara demokratis, karena hal itu masih sangat tergantung pada adanya *good will* politik dari elite politik, apakah antara eksekutif dan yudikatif mampu membangun sinergi positif bagi pembangunan sistem politik yang demokratis atau tidak.

Tabel 3.7  
 Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang  
 Rekrutmen Politik yang Terbuka dalam Sistem Demokrasi

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Tidak mengetahui	4	4,00
2.	Kurang mengetahui	57	57,00
3.	Mengetahui	34	34,00
4.	Sangat mengetahui	5	5,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 4 yang telah diolah.

Dalam sistem demokrasi, selalu ditandai keberadaan partai politik, di mana partai politik sebagai infrastruktur politik senantiasa menyiapkan kader-kader pilihan yang hendak diajukan sebagai pimpinan negara ke depan. Melalui mekanisme kaderisasi yang terbuka, maka dijamin akan menghasilkan calon-calon pemimpin yang andal, jujur, amanah dan capable, serta mampu membawa bangsa menuju pada kehidupan yang lebih sejahtera.

Tabel 3.7. di atas memperlihatkan sebanyak 57% responden mengaku kurang mengetahui tentang rekrutmen politik yang terbuka agar memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan. Bahkan terdapat sebanyak 4% responden lainnya mengaku tidak mengetahuinya. Kelompok responden ini beralasan bahwa pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan partai politik di Indonesia selama ini belum mampu menjamin iklim rotasi kekuasaan yang optimal, di mana dalam prakteknya partai politik yang ada, dikuasai oleh elite-elite tertentu demi mewujudkan kepentingan kelompok dan kepentingan pribadinya. Partai politik yang seharusnya merupakan wadah penyaluran aspirasi rakyat, tidak lagi

berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga parpol hanya terkesan sebagai institusi yang bermotif mencari kekuasaan, tanpa mengindahkan aspirasi rakyat yang dulu telah memilihnya. Reduksi nilai-nilai demokrasi semacam inilah yang dewasa ini menggejala di negeri ini, sehingga mayoritas responden menjadi skeptis atas proses rekrutmen yang berlangsung untuk setiap parpol, dapat berlangsung secara terbuka. Hal ini lebih diperburuk lagi dengan adanya artis-artis terkenal yang dipilih sebagai calon anggota legislatif yang diusung oleh parpol tertentu dengan alasan untuk meraih jumlah suara yang optimal. Penyederhanaan ornamen-ornamen demokrasi semacam ini akhirnya dimaknai oleh sebagian besar responden sebagai sebuah bentuk pengebirian atas pelaksanaan rekrutasi secara terbuka di dalam parpol.

Tabel 3.8  
Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang  
Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Negara Demokrasi

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Tidak mengetahui	7	7,00
2.	Kurang mengetahui	25	25,00
3.	Mengetahui	62	62,00
4.	Sangat mengetahui	6	6,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 5 yang telah diolah.

Tabel 3.8. memperlihatkan sebagian besar responden mengetahui bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa melakukan pemilihan umum, yaitu sebanyak 62%. Bahkan terdapat sejumlah 6% responden lainnya yang mengaku sangat mengetahui. Mayoritas responden ini sangat paham bahwa dalam sistem demokrasi maka pelaksanaan pemilihan umum merupakan suatu keharusan yang

dijalankan dalam rangka menjaga mekanisme rotasi kekuasaan agar pemerintahan berlangsung demokratis dan tidak otoriter. Pemilihan umum merupakan suatu alat, agar sistem pemerintahan yang dibangun suatu bangsa bisa berlangsung secara demokratis, sejalan dengan dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain sebanyak 25% responden mengaku kurang mengetahui tentang hal tersebut, dan selebihnya sejumlah 7% responden lainnya mengaku tidak mengetahuinya. Minoritas responden ini beralasan bahwa sistem pemilihan umum yang demokratis pun belum dapat menjamin berlangsungnya pemerintahan yang demokratis juga, karena hal tersebut sangat tergantung pada kandidat-kandidat yang terpilih dalam pemilihan umum, sejauhmana memiliki kapabilitas dan sikap negarawan yang dicita-citakan oleh publik.

Tabel 3.9

Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Pelaksanaan Demokrasi kaitannya dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kebebasan Pers

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Tidak mengetahui	13	13,00
2.	Kurang mengetahui	46	46,00
3.	Mengetahui	34	34,00
4.	Sangat mengetahui	7	7,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 6 yang telah diolah.

Tabel 3.9 memperlihatkan sebagian besar responden kurang mengetahui bahwa dalam sistem demokrasi selalu ditandai dengan adanya pelaksanaan HAM dan kebebasan pers, yaitu sebanyak 46 persen. Bahkan terdapat sejumlah 13% responden lainnya sangat tidak mengetahui. Dalam perspektif kelompok

mayoritas responden ini, pelaksanaan HAM dan demokrasi merupakan sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah dari pelaksanaan sistem demokrasi. Hal ini disebabkan bahwa dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis pun, penghargaan terhadap HAM dan kebebasan pers pun dapat dilakukan, sebagaimana berlangsung di negara-negara yang menganut paham monarki. Di sisi lain sebanyak 34% responden mengaku mengetahui bahwa dalam pelaksanaan sistem demokrasi terkandung juga pelaksanaan prinsip HAM dan kebebasan pers. Pandangan ini dibangun atas pengembangan konsep *Trias Politica* dengan menempatkan kebebasan pers sebagai salah satu elemen dasar berbangsa dan bernegara di luar kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, di mana pers ditempatkan sebagai kekuatan keempatnya.

Tabel 3.10  
Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Tidak mengetahui	8	8,00
2.	Kurang mengetahui	18	18,00
3.	Mengetahui	68	68,00
4.	Sangat mengetahui	6	6,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 7 yang telah diolah.

Tabel 3.10 memperlihatkan sebagian besar responden mengaku mengetahui tentang proses demokratisasi di Indonesia, yaitu sebanyak 68 persen. Bahkan terdapat sejumlah 6% responden lainnya yang mengaku sangat mengetahui tentang hal itu. Pengetahuan responden tentang proses demokratisasi di Indonesia

tersebut antara lain diwujudkan dengan adanya; Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilihan Umum yang teratur, adanya jaminan kebebasan pers yang diwujudkan melalui undang-undang, adanya jaminan akan HAM, serta instrumen-instrumen lainnya, di mana sebelumnya di era Orde Baru tidak ditemukan. Demokratisasi yang berlangsung selama ini di Indonesia dinilai mayoritas responden merupakan sebuah dinamika sosial politik yang cukup revolusioner, setelah dalam beberapa dasa warsa masyarakat Indonesia dibelenggu oleh pemerintahan tirani Orde Baru, yang sangat kecil porsinya memberikan jaminan demokrasi pada warga negaranya.

Tabel 3.11

Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Masa Transisi Demokrasi di Indonesia

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Tidak mengetahui	4	4,00
2.	Kurang mengetahui	24	24,00
3.	Mengetahui	61	61,00
4.	Sangat mengetahui	11	11,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 8 yang telah diolah.

Tabel 3.11 memperlihatkan sebagian besar responden mengetahui tentang terjadinya masa transisi, yaitu pergantian dari rezim otoriter (era Soeharto) menuju rezim demokrasi (era B.J. Habibie), yaitu sebanyak 61%. Bahkan terdapat sejumlah 11% responden lainnya mengaku sangat mengetahui. Dominannya pengetahuan responden mengenai terjadinya masa transisi tersebut antara lain disebabkan oleh gencarnya pemberitaan di media massa, internet dan beberapa

gerakan buruh dan mahasiswa pada saat itu yang menghendaki dibukanya kran demokrasi di Indonesia. Sedangkan sebagian kecil responden yang mengaku kurang mengetahui dan tidak mengetahui terjadinya transisi beranggapan bahwa perubahan pola demokrasi seperti itu dinilainya sebagai sebuah keniscayaan, di mana faktanya memang harus terjadi seperti itu.

Tabel 3.12

Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Konsolidasi Demokrasi

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Tidak mengetahui	5	5,00
2.	Kurang mengetahui	19	19,00
3.	Mengetahui	59	59,00
4.	Sangat mengetahui	17	17,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 9 yang telah diolah.

Tabel di atas memperlihatkan sebagian besar responden (59%) mengetahui bahwa konsolidasi yang dilakukan pemerintah merupakan tindakan untuk menguatkan sistem pemerintahan dengan melakukan perbaikan terhadap sistem politik, lembaga-lembaga, dan budaya politik. Bahkan terdapat sejumlah 17% responden lainnya mengaku sangat mengetahui tentang hal itu. Di sisi lain terdapat sebanyak 19% responden yang kurang mengetahui, dan sisanya sebesar 5% mengaku tidak mengetahui tentang dilakukannya konsolidasi oleh pemerintah tersebut. Konsolidasi yang dimaksudkan di sini adalah merupakan tahapan awal untuk menciptakan kesamaan persepsi, beserta pelaksanaan startegi dan taktik dalam melangsungkan program kerja pemerintah nantinya.

Tabel 3.13  
Deskripsi Responden Menurut Pengetahuan tentang Budaya Politik

No.	Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Tidak mengetahui	5	5,00
2.	Kurang mengetahui	60	60,00
3.	Mengetahui	21	21,00
4.	Sangat mengetahui	14	14,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 10 yang telah diolah

Tabel 3.13 memperlihatkan sebagian besar responden (60%) mengaku kurang mengetahui tentang budaya politik sebagai sikap individu terhadap peranannya di dalam sistem politik. Bahkan terdapat sejumlah 5% responden lainnya yang mengaku tidak mengetahui. Menurut pandangan mayoritas kelompok responden ini, budaya politik diasumsikan semacam kebiasaan atau adat-istiadat dalam sistem politik, di mana dalam kompetisi perebutan kekuasaan politik (pemilihan umum) seharusnya mengacu pada adat istiadat dan budaya yang berkembang, dalam arti tetap harus mengedepankan sikap budaya Indonesia.

Tabel 3.14  
Sumber Pengetahuan Responden tentang Demokratisasi di Indonesia

No.	Sumber Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Pengalaman orang lain	18	18,00
2.	Pengalaman orang lain dan diskusi dengan sesama mahasiswa	45	45,00
3.	Media massa, diskusi dengan orang lain dan pengalaman orang lain	34	34,00
4.	Internet, media massa, diskusi dengan orang lain dan pengalaman orang lain	3	3,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 11 yang telah diolah.

Tabel 3.14 memperlihatkan sebagian besar responden mengaku memperoleh sumber pengetahuan tentang demokratisasi di Indonesia dari pengalaman orang lain dan diskusi antarmahasiswa, yaitu sebesar 45%. Sumber pengetahuan selanjutnya adalah media massa, diskusi dengan mahasiswa dan pengalaman orang lain, yang diakui oleh sejumlah 34% responden, dan yang terkecil adalah sumber pengetahuan tentang demokratisasi di Indonesia yang berasal dari internet, yaitu sebanyak 3%.

Dari tabel tersebut dapat pula dimaknai bahwa sumber pengetahuan tentang demokratisasi di Indonesia yang paling dominan adalah sumber-sumber yang berlangsung melalui komunikasi *face-to-face*, baik secara komunikasi antar personal (pengalaman orang lain), maupun secara komunikasi kelompok (diskusi dengan mahasiswa lain). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pengaruh komunikasi *face-to-face* secara langsung merupakan determinan penting bagi pembentukan persepsi mahasiswa tentang demokratisasi di Indonesia, apabila dibandingkan dengan media massa maupun media sosial (internet, *facebook*, *twitter* dan sejenisnya).

### 3.2.2 Orientasi Afektif Mahasiswa

Orientasi afektif merupakan keyakinan dan keterlibatan secara emosional mahasiswa terhadap demokratisasi di Indonesia. Melalui orientasi afektif, dapat diketahui respon mahasiswa terhadap demokratisasi di Indonesia, apakah respon

tersebut bersifat meyakini atau tidak meyakini terhadap sistem demokrasi dan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia.

Tabel 3.15  
Deskripsi Responden menurut Keyakinan terhadap Kesesuaian Sistem  
Demokrasi dan Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia

No.	Keyakinan	Frekuensi	%
1.	Tidak meyakini	8	8,00
2.	Kurang meyakini	18	18,00
3.	Meyakini	67	67,00
4.	Sangat meyakini	7	7,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 12 yang telah diolah

Tabel 3.15 memperlihatkan sebagian besar responden (67%) meyakini bahwa sistem demokrasi sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Bahkan sejumlah 7% responden lainnya sangat meyakini bahwa hal tersebut sangat sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Tingginya keyakinan responden didasarkan pada kondisi sosial budaya Indonesia yang sangat heterogen, sehingga dalam rangka membangun semangat kebersamaan dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, maka suksesi kekuasaan harus dilakukan secara demokratis, yang pada gilirannya akan merepresentasikan suku, etnis, agama dan budaya yang sangat beragam yang hidup di bumi Indonesia. Melalui kompetisi secara terbuka dan adil dalam Pemilu akan dihasilkan pemerintahan yang akuntabel dan kompeten untuk mampu mencapai tujuan negara, sebagaimana amanat konstitusi.

Tabel 3.16  
 Deskripsi Responden Menurut Keyakinan bahwa Pemerintah Indonesia  
 Sudah Akuntabel

No.	Keyakinan	Frekuensi	%
1.	Tidak meyakini	1	1,00
2.	Kurang meyakini	39	39,00
3.	Meyakini	48	48,00
4.	Sangat meyakini	12	12,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 13 yang telah diolah.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, maka salah satu elemen pokok yang harus dijaga adalah aspek akuntabilitas, artinya setiap formulasi dan kebijakan dari pemerintah dan elite politik dapat dimaknai dan dikritisi oleh publik secara terbuka. Dari tabel di atas, sebagian besar responden (48%) meyakini bahwa sistem pemerintahan yang sekarang akuntabel, dan bahkan sejumlah 12% responden lainnya sangat meyakinya. Tingginya tingkat keyakinan responden ini dikarenakan bahwa setiap sepak terjang dan gerak-gerik pemerintah hampir selalu dapat diakses publik secara terbuka, sehingga bisa dikritisi substansi dari formulasi kebijakan tersebut. Sedangkan minoritas responden yang kurang dan tidak meyakini memiliki alasan bahwa karena setiap kali lahir kebijakan baru, walaupun sudah dapat diakses oleh publik secara terbuka dan dikritisi secara tajam, akan tetapi sikap pemerintah selama ini cenderung stagnan, maka sikap pemerintah seperti itu dinilainya kurang atau tidak akuntabel.

Tabel 3.17  
Deskripsi Responden Menurut Keyakinan Terhadap  
Suksesi Kekuasaan di Indonesia

No.	Keyakinan	Frekuensi	%
1.	Tidak meyakini	5	5,00
2.	Kurang meyakini	24	24,00
3.	Meyakini	68	68,00
4.	Sangat meyakini	3	3,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 14 yang telah diolah.

Sebagian besar responden (68%) meyakini bahwa di Indonesia sudah terjadi suksesi kekuasaan, dan bahkan sebanyak 3% responden lainnya sangat meyakininya. Kondisi ini didasarkan bahwa dengan telah berlangsungnya 4 kali Pemilu pascareformasi 1998. Terjadinya pergantian kepemimpinan dan pemenang Pemilu tersebut menurut anggapan mayoritas responden dianggap identik dengan telah terjadinya rotasi kekuasaan. Sedangkan minoritas responden yang kurang dan tidak meyakini telah terjadinya rotasi kekuasaan, didasarkan adanya anggapan sebelum reformasi dan pascareformasi bahwa negara yang dipimpin oleh siapa pun, substansinya sama karena Indonesia masih terbelenggu permasalahan korupsi sehingga suksesi kekuasaan belum terjadi. Bagi sebagian kecil responden ini, suksesi hanya terjadi pada penguasa, namun belum menyentuh pergantian mental penguasa atau pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Tabel 3.18  
Deskripsi Responden menurut Keyakinan terhadap Keterbukaan  
Rekrutmen Politik

No.	Keyakinan	Frekuensi	%
1.	Tidak mempercayai	10	10,00
2.	Kurang mempercayai	28	28,00
3.	Mempercayai	60	60,00
4.	Sangat mempercayai	2	2,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 15 yang telah diolah

Tabel 3.18 memperlihatkan bahwa responden yang mempercayai rekrutmen politik sudah terlaksana secara terbuka di Indonesia, merupakan kelompok yang terbesar, yaitu sebanyak 60%. Bahkan terdapat sejumlah 2% responden lainnya yang sangat memercayainya. Tingginya kepercayaan ini didasari alasan bahwa pada Pemilu 2009 yang lalu, banyak sekali tokoh-tokoh muda yang bisa duduk di kursi legislatif, baik di tingkat pusat (DPR), tingkat provinsi dan kabupaten/kota (DPRD). Indikasi ini terjadi hampir di setiap partai politik, baik yang berhaluan nasionalis maupun religius. Sedangkan sebagian kecil responden yang kurang dan tidak memercayainya beralasan bahwa memang secara nominal kuantitatif legislator muda banyak bermunculan di setiap partai politik, baik dari kalangan pengusaha, pengacara, aktivis, pejuang buruh, namun apabila dinilai dari sisi elektabilitas, kebanyakan mereka kaum muda ini memiliki kedekatan secara pribadi dengan elite parpol, sehingga mengurangi unsur keterbukaan dari sebuah rekrutmen sebagaimana mestinya.

Tabel 3.19  
Deskripsi Responden Menurut Keyakinan Terhadap Kejujuran dan  
Keadilan Pelaksanaan Pemilu

No.	Keyakinan	Frekuensi	%
1.	Tidak meyakini	9	9,00
2.	Kurang meyakini	33	33,00
3.	Meyakini	51	51,00
4.	Sangat meyakini	7	7,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 16 yang telah diolah.

Tabel 3.19 memperlihatkan sebagian besar responden (51%) meyakini bahwa pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung di Indonesia sudah berjalan dengan jujur dan adil; bahkan sejumlah 7% responden lainnya sangat meyakini hal itu. Tingginya keyakinan responden ini disebabkan bahwa selama pemerintahan di era reformasi ini, pelaksanaan pemilu dinilai cukup demokratis, di mana setiap elemen dan komponen bangsa yang ikut serta dalam pesta demokrasi dapat memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Adapun sebagian kecil responden yang kurang meyakini dan tidak meyakini bahwa pemilu selama ini berlangsung secara baik dan benar memiliki anggapan bahwa demokrasi hanyalah merupakan alat, dan pemilihan umum yang berlangsung sekedar formalitas suksesi kekuasaan, dengan mengabaikan tujuan mulia tercapainya demokrasi itu sendiri, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Pelaksanaan demokrasi masih dalam tataran demokrasi prosedural, belum menyentuh substansi dan esensi tercapainya tujuan demokratisasi yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera.

Tabel 3.20  
 Deskripsi Responden Menurut Perasaan terhadap Adanya  
 Perlindungan HAM dan Kebebasan Pers di Indonesia

No.	Perasaan	Frekuensi	%
1.	Tidak merasakan	34	34,00
2.	Kurang merasakan	38	38,00
3.	Merasakan	22	22,00
4.	Sangat merasakan	6	6,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 17 yang telah diolah.

Tabel 3.20 memperlihatkan sebagian besar responden (38%) kurang merasakan tentang adanya HAM dan kebebasan pers di negeri ini. Bahkan terdapat sejumlah 34% responden lainnya tidak merasakan adanya semua itu. Kondisi ini memberikan arahan bahwa secara umum pelaksanaan HAM dan kebebasan pers belum berlangsung secara optimal. Menurut mayoritas kelompok responden ini, indikasi tersebut tampak dari masih banyaknya tindakan kekerasan aparat terhadap berbagai demonstrasi yang dilakukan kalangan buruh dan mahasiswa; adanya intimidasi terhadap jurnalis yang dinilai memiliki akses pemberitaan yang kontroversial, bahkan tidak jarang menyebabkan kematian bagi jurnalis yang bersangkutan. Ditambahkan pula masih banyaknya kasus lemahnya perlindungan HAM kelompok minoritas di berbagai daerah; termasuk lemahnya perlindungan hukum. Ada responden yang menyebut kasus GKI Yasmin di Bogor, dimana kasasi Mahkamah Agung memenangkan pihak gereja tetapi kasasi tidak bisa dilaksanakan (dieksekusi).

Tabel 3.21  
 Deskripsi Responsen Menurut Keyakinan terhadap Demokratisasi Dalam  
 Tatakelola Pemerintahan di Indonesia

No.	Keyakinan	Frekuensi	%
1.	Tidak meyakini	28	28,00
2.	Kurang meyakini	35	35,00
3.	Meyakini	31	31,00
4.	Sangat meyakini	6	6,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 18 yang telah diolah.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden kurang meyakini dan tidak meyakini demokratisasi di Indonesia mampu memperbaiki kondisi tatakelola pemerintahan menjadi lebih baik (63%). Kelompok mayoritas responden ini menilai bahwa pelaksanaan demokratisasi di Indonesia selama ini hanya berlangsung secara artifisial, artinya hanya bersifat instrumen dan retorika pemerintah belaka, namun belum mengarah pada penyelenggaraan prinsip-prinsip demokratisasi yang ideal. Selama ini terkesan sangat kuat bahwa penyelenggaraan birokrasi masih memiliki tendensi tertentu, dan belum mampu berfungsi dalam rangka menyamakan semua prosedur bagi seluruh rakyat yang dilayaninya. Dalam hal ini penyelenggara birokrasi masih melihat aspek dan unsur tertentu dari rakyat yang membutuhkan pelayanannya, dan belum seragam dalam standar operasional pelayanannya.

Tabel 3.22  
 Deskripsi Responden Menurut Keyakinan tentang Kaitan Budaya Politik dan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia

No.	Keyakinan	Frekuensi	%
1.	Tidak meyakini	9	9,00
2.	Kurang meyakini	47	47,00
3.	Meyakini	30	30,00
4.	Sangat meyakini	14	14,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 19 yang telah diolah.

Tabel di atas memperlihatkan sebagian besar responden kurang meyakini dan tidak meyakini tentang perlunya budaya politik dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang demokratis (56%). Rendahnya keyakinan responden terhadap perlunya budaya politik dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis tersebut disebabkan kebanyakan masyarakat sudah muak dengan karut-marut tatakelola dan penyelenggaraan negara. Terlebih parah lagi, sudah sistem tatakelolanya tidak baik, mental koruptif pada oknum penyelenggara negara juga dinilai sudah sangat meresahkan, sehingga mayoritas responden kurang meyakini tentang akan terwujudnya penyelenggaraan negara yang demokratis.

Sedangkan sebagian kecil responden yang meyakini tentang perlunya budaya politik dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia, tidak lain adalah demi menjaga kesetaraan warga negara dalam bidang hukum, sosial, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan.

Tabel 3.23  
 Deskripsi Responden Menurut Keyakinan tentang Kesesuaian Harapan  
 Terhadap Demokratisasi di Indonesia

No.	Keyakinan	Frekuensi	%
1.	Tidak sesuai	1	10,00
2.	Kurang sesuai	38	38,00
3.	Sesuai	45	45,00
4.	Sangat sesuai	16	16,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 20 yang telah diolah.

Penyelenggaraan demokratisasi di Indonesia selama ini dinilai sebagian besar responden (61%) sudah dan sangat sesuai. Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator demokrasi, seperti terbentuknya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan berbagai omisi lainnya (*auxiliary state organs*) sebagai perwujudan tatakelembagaan demokrasi dan jaminan perlindungan kepentingan rakyat terhadap potensi berbagai kebijakan public yang merugikan rakyat.

Sedangkan sebagian kecil responden yang menilai demokratisasi di Indonesia kurang atau tidak sesuai dengan harapan, menyampaikan beberapa alasan, seperti: 1) demokratisasi berlangsung secara formal instrumental, belum menyentuh ke hal-hal yang substansial, jadi selama ini hanya menyentuh kulit, belum menyentuh hati dan jantung dari proses demokratisasi itu sendiri; 2) terlihat masih kuatnya indikasi feodalistik dan sistem *patron-client* di beberapa partai politik; 3) lembahnya supremasi hukum, di mana seringkali negara tidak hadir saat masyarakat membutuhkan keterlibatan negara sebagai pengayom, pelindung sekaligus sebagai pemersatu rakyat.

### 3.2.3. Orientasi Evaluatif Mahasiswa

Orientasi evaluatif merupakan kemampuan mahasiswa menilai demokratisasi di Indonesia; yaitu kemampuan yang diperoleh dari kombinasi orientasi kognitif dan afektif.

Tabel 3.24  
Deskripsi Responden Menurut Evaluasi terhadap Demokratisasi di Indonesia

No.	Evaluasi	Frekuensi	%
1.	Tidak baik	3	3,00
2.	Kurang baik	41	41,00
3.	Baik	53	53,00
4.	Sangat baik	3	3,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Daftar pertanyaan No. 21 yang telah diolah.

Tabel 3.24 di atas memperlihatkan sebagian besar responden (53%) memiliki persepsi yang baik terhadap demokratisasi di Indonesia. Bahkan terdapat sejumlah 3% responden lainnya menilai demokratisasi di Indonesia berlangsung sangat baik. Tingginya persepsi positif atas pelaksanaan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia selama ini dikarenakan beberapa elemen dasar demokrasi ideal sebagaimana diwacanakan dalam teori, dapat diwujudkan oleh masyarakat Indonesia, walaupun masih terkesan dalam tataran instrumental atau prosedural. Namun capaian seperti itu dirasakan sudah cukup bagus, mengingat masyarakat Indonesia sempat mengalami tekanan sosial-politis yang sangat hebat di era Orde Baru, di mana pelaksanaan elemen-elemen dasar demokrasi, seperti HAM, kebebasan pers, penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur, dapat terwujud dalam waktu yang relatif singkat.

Analisis atas jawaban responden dari pertanyaan terbuka, sebagian besar menunjukkan persepsi positif terhadap demokratisasi di Indonesia. Argumentasi yang banyak dikemukakan adalah perihal manfaat demokratisasi terkait kebebasan warga negara, seperti: (1) Warga negara bisa terlibat dalam hal-hal tertentu seperti pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih; (2) Warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan menyangkut hak-hak kebebasan, termasuk hak asasi manusia (seperti hak politik, ekonomi, kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan, dan hak pribadi); (3) Masyarakat yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan (pemilu). Penduduk memilih secara rahasia tanpa ada unsur paksaan; (4) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat; dan (5) Pengutamaan persatuan nasional dan kekeluargaan.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 4.1. Kesimpulan

Mahasiswa Kota Semarang memiliki persepsi positif terhadap demokratisasi di Indonesia. Persepsi tersebut terbentuk oleh kepemilikan berbagai orientasi yang bersifat individual, yaitu orientasi kognitif (pengetahuan), afektif (keyakinan dan keterlibatan perasaan) dan evaluatif (kemampuan menilai sebagai wujud kombinasi kedua orientasi sebelumnya). Mahasiswa menilai bahwa demokratisasi telah terjadi dan berkembang dalam sistem pemerintahan di Indonesia (67% responden), sudah terlaksana dengan cukup baik (56%) dan sudah cukup sesuai dengan harapan mereka (61%). Hal tersebut tercermin dari keyakinan mahasiswa terhadap mekanisme suksesi atau pergantian pemerintahan yang demokratis (68%), pemerintahan yang akuntabel (48%), rekrutmen politik yang terbuka (60%) dan pelaksanaan pemilihan umum yang sudah berjalan cukup baik (51%). Sedangkan masih adanya ketidakyakinan mahasiswa bahwa demokratisasi yang berlangsung di Indonesia dapat memperbaiki kondisi tatakelola pemerintahan menjadi lebih baik, hal itu disebabkan persepsi mahasiswa terhadap lemahnya komitmen dan kemampuan pemerintah dalam hal penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (72%).

#### 4.2. Saran

- a. Pemerintah perlu memberikan pendidikan politik sejak dini kepada generasi muda, serta perlu memberikan ruang terbuka kepada masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dengan membuka berbagai saluran partisipasi publik.
- b. Masyarakat harus dapat menjadikan demokrasi sebagai *way of life* yang menuntun tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintahan, dan kenegaraan. Dengan demikian masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek yang berperan pasif dan tidak memiliki peran penting, namun bias menjadi aktor politik yang dapat berperan aktif di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- c. Mahasiswa sebagai penerus bangsa harus semakin peduli dan terlibat dalam berbagai persoalan kemasyarakatan dalam rangka belajar menjadi warga negara yang baik dan aktif (*good and active citizens*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Babbie, Earl. (2007). *The Practice of Social Research*. Eleventh edition. Thomson Wadsworth.
- Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel (terj.). (1997). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Muhadam Labolo, dkk. (2008). *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rakhmat, Jalaludin. (1996). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun dan Sofian Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.